

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JOMBANG

Tyas Ayu Puspita<sup>1(a)</sup>, Calvin Edo Wahyudi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
<sup>a)</sup>tyaspuspitade@gmail.com, <sup>b)</sup>kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:  
03-03-2023  
Diterbitkan Online:  
30-09-2023

#### Kata Kunci:

Collaborative Governance,  
Pengelolaan Sampah, Sanggar  
Hijau Indonesia

#### Keywords:

Collaborative Governance,  
Waste Management, Sanggar  
Hijau Indonesia

#### Corresponding Author:

tyaspuspitade@gmail.com

### ABSTRAK

Permasalahan sampah di Kabupaten Jombang menunjukkan fenomena menarik seperti yang diketahui biasanya beberapa program diluncurkan atas inisiatif pemerintah maupun regulasi dari pemerintah. Namun, kali ini Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) yang dibentuk Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Sanggar Hijau Indonesia (SHI) meluncurkan program untuk memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pendekatan pengelolaan sampah kolaboratif tata kelola Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan menggunakan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa metode tata kelola kolaboratif yang digunakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas mungkin dianggap efektif. Menurut indikator keberhasilan Goldsmith dan Kettl, masing-masing pemangku kepentingan telah berpartisipasi dalam ketiga tahapan proses dalam beberapa kombinasi berikut ini: Struktur Jaringan; Komitmen terhadap Tujuan Bersama; Kepercayaan Antar Peserta; Tata Kelola; Akses terhadap Otoritas; dan Akuntabilitas/Tanggung Jawab Distributif.

### ABSTRACT

The waste problem in Jombang Regency shows an interesting phenomenon as it is known that several programs have been launched at the initiative of the government or government regulations. However, this time the Jombang Civil Society Forum (FMMJ) which was formed by the non-governmental organization (NGO) Sanggar Hijau Indonesia (SHI) launched a program to improve waste management in Jombang Regency. The purpose of this study is to provide an overview of the Jombang Regency's collaborative governance waste management approach. This study employs a qualitative descriptive methodology using procedures for collecting data through interviews, observations, and documentation. The findings of the study indicate that the collaborative governance method used by the government, non-governmental organizations, and society at large may be deemed effective. According to Goldsmith and Kettl's indicators of success, each stakeholder has participated in all three stages of the process in some combination of the following: Network Structure; Commitment to Common Goals; Trust Among Participants; Governance; Access to Authority; and Accountability/Distributive Responsibility

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.625>

## PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,203,9 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 272,682,5 jiwa. Sedangkan pada pertengahan tahun 2022 tercatat sebanyak 275,773,8 jiwa. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan 1,17% jika dibandingkan dengan hasil sensus pada tahun 2021. Menurut Manik (2003), masalah lingkungan dapat dipastikan akan timbul seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali biasanya berkorelasi dengan kemiskinan di mana penduduk miskin minim akan pengetahuan, teknologi, dan informasi. Menurut Soemarwoto dalam jurnal Syam (2014), ia menjelaskan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka pendapatan pun ikut bertambah. Peningkatan pendapatan tentunya akan mengarah pada gaya hidup konsumtif. Hal ini dapat menimbulkan persoalan khususnya pada lingkungan karena sampah kemasan yang dihasilkan tiap individu yang menjadi pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan. Dari pola konsumtif masyarakat bisa menyebabkan terjadinya kenaikan volume, jenis, dan karakteristik sampah.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Timbunan Sampah di Indonesia**

Jumlah Timbunan Sampah 303 Kabupaten/Kota	Sampah Terkelola	Sampah Tidak Terkelola
35.930 juta ton	22.454 juta ton	13.476 juta ton

Kecenderungan volume sampah plastik yang tinggi tetapi tidak dapat diuraikan dapat berdampak buruk pada lingkungan. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama timbunan sampah terbanyak dengan jumlah 5.149.895 juta ton. Urutan kedua adalah Jawa Barat dengan jumlah 4.599.600 juta ton dan Jawa Timur menjadi provinsi ketiga dengan timbunan sampah berjumlah 3.713.918 juta ton. Terlihat seperti gambar dibawah ini:



Dalam hal ini terdapat fenomena menarik di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Jombang bahwa seperti yang diketahui biasanya beberapa program diluncurkan atas inisiatif pemerintah maupun regulasi dari pemerintah. Namun, kali ini Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) yang dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sanggar Hijau Indonesia (SHI) meluncurkan program untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Jombang. Tentunya program yang disarankan atas dasar ide dari Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) yang mengalami keresahan akan pengelolaan sampah dan ingin memperbaiki menuju bebas sampah. Maka dari itu, Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) melakukan pengelolaan sampah dengan mengimplementasikan beberapa program salah satunya Si BESUT 3AH yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021.

Salah satu landasan utama pengelolaan sampah dalam (Undang-Undang No 18 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008) yaitu terdapat pembagian tugas dan peran bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pihak non-pemerintah, dan masyarakat. Menurut Emerson (2011) dalam jurnal Ramadhona et al., (2020), istilah *collaborative governance* adalah suatu proses yang melibatkan struktur publik dalam pengambilan keputusan serta manajemen kebijakan dengan pelibatan secara konstruktif. Bentuk kerjasama yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang adalah dengan melakukan penanganan sampah yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) dibawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat dan peran pemerintah Kabupaten Jombang yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penelitian terdahulu proses *collaborative governance* bidang pengelolaan sampah sebenarnya telah menjadi sasaran penelitian yang luas dari berbagai ilmuwan yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Idris et al., (2022) yang berjudul *Collaborative*

*Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna yang dalam temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa masih ada kekurangan dalam proses *collaborative governance* dimana masih terdapat kekurangan dalam bantuan materiil dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan data di atas, peneliti memilih topik ini karena belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menitikberatkan pada sebuah proses *collaborative governance*. Model *collaborative governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model dari Ratner (2012), yang didalamnya terdapat tiga tahapan proses meliputi: 1) Identifikasi hambatan dan peluang; 2) Strategi debat untuk mempengaruhi; dan 3) Merencanakan tindakan kolaborasi. Peneliti menggunakan model ini karena fenomena yang ada pada latar belakang sejalan dengan proses yang dicetuskan oleh Ratner (2012). Sebagaimana awal mula dari adanya permasalahan membuat pihak non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi aktor utama sebagai penggerak dari adanya program pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2013) dalam John W & Poth (2018), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai studi tentang isu-isu sosial dengan menggunakan survei, pengumpulan data dan analisis data. dan berfokus pada *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Lokasi penelitian untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Jombang dan Sanggar Hijau Indonesia, tepatnya berada di Kabupaten Jombang.

Sumber informasi primer dan sekunder digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan dalam investigasi ini adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari informan kunci selama penelitian lapangan berlangsung. Sedangkan data sekunder mengenai Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang diperoleh dari dokumen dan arsip lain dengan bantuan media

cetak dan media online. Sumber informasi ini telah dikonsultasikan.

Triangulasi sumber, suatu metode teknologi validasi data yang dilakukan dengan menganalisis data penelitian dari berbagai sumber, digunakan peneliti untuk menilai kualitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini (Rahardjo, 2010) melalui pengumpulan dokumentasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang serta wawancara mendalam kepada Sekretaris Forum Masyarakat Madani Jombang. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2019) meliputi: 1) Pengumpulan data (*Data Collection*); 2) Kondensasi data (*Data Condensation*); 3) Penyajian data (*Data Display*); dan 4) Penarikan kesimpulan (*Conclusion*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)**

Ratner (2012) dalam Retno et al., (2020), menyatakan proses *collaborative governance* diawali dengan proses identifikasi hambatan dan peluang antar pemangku kepentingan. Pada tahapan ini, Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) dalam pengelolaan sampah Kabupaten Jombang bersama dengan *stakeholders* dan masyarakat Identifikasi berbagai tantangan dan peluang yang mungkin muncul selama proses kolaborasi. Pada langkah ini, masing-masing pemangku kepentingan mendiskusikan isu-isu tersebut dengan pihak lain dan mendengarkan kekhawatiran mereka.

Hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak M. Amin Kurniawan, ST, M.Ling selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang memaparkan,

“...Jadi kalau kita ngomong permasalahan lingkungan dan didalamnya ada sampah, kita dari sisi DLH tidak bisa bekerja sendiri, ada beberapa hal yang memang harus dikolaborasikan. Yang pertama regulasi, ketersediaan sarana dan prasana, dan aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah” (Hasil Wawancara 11 Januari 2023).

Menurut Pak Amin, kapasitas penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tidak terlalu banyak mulai dari anggaran sarana prasarana seperti truk pengangkutan sampah hingga anggaran untuk

tenaga kerja. Selain itu masih kurangnya aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Sehingga dalam hal ini pihak pemerintah memerlukan bantuan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah.

Selain itu, Bapak M. Amin Kurniawan, ST, M.Ling selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang memaparkan,

“...karena sampah ini sudah menjadi permasalahan prioritas, tapi kadang pemahaman masyarakat yang kurang. Jadi layanan kami terkait penanganan sampah ini baru sekitar 37% artinya masih ada 63% sampah masyarakat yang belum terkelola. Kalau dilihat biasanya ada sampah di pinggir jalan atau di sungai dll, kadang masyarakat menganggap seperti itu karena pemerintah gagal untuk menyediakan sarpras yang memadai. Padahal sebenarnya yang kita dorong, minimal jika belum ada sarpras di desa, ada upaya pribadi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi sampah” (Hasil Wawancara 11 Januari 2023).

Dalam proses pengidentifikasian ini memberikan peluang kepada pihak Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) selaku aktor utama yang menjadi inisiator untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan sampah. Pihak Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam perencanaan daerah Kabupaten Jombang berupa *policy brief*. *Policy brief* sebagai hasil dari identifikasi dan analisa menjadi sangat penting untuk landasan dalam penyusunan strategi dan *masterplan* proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Berikut merupakan 6 rekomendasi ditujukan kepada sekretaris daerah dan telah disetujui dengan isi sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan operasional berupa Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang menyatakan harus ada pengelolaan sampah.
2. Mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk memulai pengembangan mekanisme pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang mudah diakses serta sistem informasi pengelolaan sampah terpadu berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019; ini harus dilakukan sesegera mungkin.

3. Memperluas inisiatif penjangkauan dan pendidikan publik secara signifikan, dimulai dari keluarga, dengan memanfaatkan beragam taktik dan bentuk media terkait pengelolaan sampah.
4. Mendorong DPMD untuk membantu Pemerintah Desa dalam memasukkan pengelolaan sampah ke dalam dokumen Strategi Perencanaan Desa (RPJMDesa) dan pada Lembaga Pengelola Sampah yang berada di desa.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (DLH) mempunyai tugas mempraktekkan model pengelolaan sampah dengan menggunakan teknik atau pendekatan Si BESUT 3AH.
6. Mendesak Bupati untuk menetapkan peraturan yang mengatur bahwa setiap industri swasta harus mempunyai kebijakan fungsional dalam pengelolaan limbahnya, dengan penekanan pada pengurangan limbah.

Pada tahap pertama ini, konsep *collaborative governance* sudah tercermin dalam proses identifikasi hambatan dan peluang dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

### **Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)**

Strategi debat untuk mempengaruhi dalam model *collaborative governance* menurut Ratner (2012), dapat dipahami bahwa pada tahap ini Pada tahap kedua proses kolaborasi, mereka yang terlibat dalam proses tersebut mengatasi tantangan dan kemungkinan yang ditemukan pada tahap pertama. Pada titik ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan bagaimana para pemangku kepentingan akan berkomunikasi satu sama lain. Proses dialog ini tercermin pada *Forum Discuss Group* (FGD) yang dilaksanakan oleh pihak Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) dengan perwakilan masyarakat dari Desa Sambongdukuh dan Kelurahan Kaliwungu. Formulasi hasil *Forum Discuss Group* (FGD) bersama masyarakat menjadi rekomendasi yang penting bagi pihak pemerintah. Sebagaimana Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) melakukan diskusi untuk melakukan kolaborasi bersama dengan beberapa pihak diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang,

Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, DP3, serta akademisi seperti: Universitas Darul Ulum, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jombang. Selain itu, FMMJ menggandeng privat sektor dari PT. Astra tol.

Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya melakukan perencanaan strategi pada instansi horizontal, namun juga dilakukan perencanaan pada instansi vertikal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Weber, Lovrich, dan Gaffney (2005) dalam (Retno et al., 2020) yang mengemukakan bahwa kolaborasi dapat diselesaikan jika perjanjian integrasi fungsi berhasil diselesaikan. Integrasi ini terjadi di seluruh tingkat pemerintahan, bidang kebijakan, dan operasional birokrasi, dan melibatkan partisipasi warga negara. Keterkaitan antara lembaga pemerintah dengan lembaga lain, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah digambarkan dalam dimensi vertikal sebagai hubungan top-down.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat dari tinjauan teori mengenai strategi debat untuk memengaruhi telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana seluruh pemangku kepentingan telah berkomitmen akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna merealisasikan tujuan bersama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

### **Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Action*)**

Ratner (2012) berpendapat bahwa pada tahap ketiga ini merupakan fase pilihan setelah melalui fase mendengarkan dan fase dialog. Kini setelah kita mencapai titik ini dalam proses ini, banyak pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam kolaborasi ini mungkin mulai membuat rencana pelaksanaan berbagai strategi yang telah dibahas sebelumnya. Perencanaan dilakukan secara metodis sesuai tanggung jawab utama masing-masing pihak untuk memastikan tidak terjadi duplikasi tugas saat bekerja sama. Misalnya Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) yang melakukan evaluasi bersama yang dihadiri oleh masyarakat sipil sebagai kader dan pihak pemerintah sebagai pelaksana. Merencanakan tindakan kolaborasi yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) adalah dengan menerapkan rekomendasi yang terdapat pada *policy brief*.

Para pemangku kepentingan dituntut untuk selalu mengambil andil pada tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati bersama. Dengan harapan proses kolaborasi yang dilakukan dapat terjaga dan terus berlangsung dalam jangka panjang. Sebagaimana pada implementasinya, pihak Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) sudah menyusun secara lengkap *policy brief* yang harus dilakukan, bagaimana jika sudah dicapai, apa yang belum dicapai, hingga apa yang harus dilakukan setelah pencapaian. Peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing para pemangku kepentingan secara keseluruhan telah berkontribusi secara baik dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Seperti yang dikatakan oleh Ansel and Gash (2007) bahwa *outcomes* dari Ketika hasil dari tujuan dan manfaat kerjasama dapat dirasakan secara praktis walaupun masih kecil sebagai konsekuensi perantara (menengah) dari proses kerjasama maka kerjasama dapat dilanjutkan. Pencapaian sederhana ini, kadang-kadang dikenal sebagai “kemenangan kecil”, mempunyai potensi menjadi faktor motivasi dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari banyak pemangku kepentingan. *Outcomes* tersebut berupa proses *Collaborative Governance* yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah, dan masyarakat dalam pengaplikasian sehari-hari dengan berbagai tindakan kolaborasi seperti memunculkan Peraturan Bupati Jombang nomor 56 tahun 2022 tentang Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, mengoptimalkan TPS3R dilakukan pada tahun 2022 menggunakan P-APBD, Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi replikasi Si BESUT 3R pada kegiatan TPS3R, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitasi replikasi Si BESUT pada SW3 di Ponpes Darul Ulum Asrama 4i Ainusyam, undang-undang yang mengamanatkan rencana operasional pengelolaan sampah untuk sektor swasta, khususnya pengurangan sampah.

Setelah melakukan analisa proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi mengenai kriteria keberhasilan kolaborasi bersama menurut Goldsmith and Kettl antara lain:

#### a) *Network Structure*

Model struktur jaringan dalam kolaborasi ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan koordinasi diluar pemerintahan untuk memperbaiki

pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang, dalam konteks kolaborasi yang dilakukan terjadi antara Forum Diskusi Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) dibawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Hijau Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, serta masyarakat Desa Sambongdukuh dan Kelurahan Kaliwungu. Kolaborasi ini bersifat semi formal karena sudah terdapat perjanjian tertulis sejenis MoU yang disetujui oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Terkait dengan kedudukan dari tiap pemangku kepentingan yang terlibat adalah sama, tidak ada pihak yang berkedudukan leboh tinggi, hanya saja memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan kolaborasi ini.

b) *Commitment to a Common Purpose*

Terjalannya kolaborasi ini tentu tidak terlepas dari adanya sebuah komitmen yang dilakukan dari masing-masing pemangku kepentingan. Peneliti memperoleh data bahwa seluruh elemen mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Wujud komitmen tersebut terlihat dari kontribusi tiap para pemangku yang sudah dilakukan secara baik dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

c) *Trust Among the Participants*

Kepercayaan merupakan hal yang paling penting sebagaimana para pemangku kepentingan mempercayakan informasi-informasi kepada pihak yang terlibat dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, sudah ada rasa saling percaya untuk membagikan informasi maupun data dari masing-masing pemangku kepentingan dalam koordinasi perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

d) *Governance*

Dalam structural kolaborasi bersama untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang ini belum tergambar jelas mengingat perjanjian tertulis kolaborasi ini masih dalam proses penyusunan. Selama ini kolaborasi berjalan hanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan. Hanya berdasarkan pada *policy brief* pihak FMMJ terus melakukan *monitoring* dan

evaluasi bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Dukungan dari semua elemen tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan sudah dilakukan dengan baik.

e) *Access to Authority*

Ketersediaan norma atau persyaratan proses yang dapat dipahami dan diakui secara luas merupakan akses terhadap otoritas. Keseluruhan dari seluruh pemangku kepentingan sudah memahami alur prosedur dengan jelas dalam konteks pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah dan juga mengetahui tugas pokok serta fungsinya sehingga diharapkan tujuan dari kolaborasi ini dapat tercapai.

f) *Distributive Accountability/ Responsibility*

Dalam akuntabilitas dan responsibilitas terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antar pemangku kepentingan dalam kolaborasi. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, kriteria ini dapat dilihat pada tahap terakhir atau tahap Merencanakan Tindakan Kolaborasi. Sebagaimana tahapan tersebut merupakan tindaklanjut untuk melaksanakan atau merealisasikan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya pada fase mendengarkan dan fase dialog. Pada poin ini, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan saling memiliki tim untuk mengawasi maupun mengimplementasikan program Si BESUT 3AH.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses *collaborative governance* yang dilakukan antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat keseluruhannya dapat dikatakan berhasil. Tiap pemangku kepentingan telah menjalankan perannya dalam tiga tahapan proses sesuai dengan indikator kriteria keberhasilan menurut menurut Goldsmith and Kettl antara lain: *Network Structure*; *Commitment To A Common Purpose*; *Trust Among The Participants*; *Governance*; *Access To Authority*; dan *Distributive Accountability/ Responsibility*. Hal itu dilihat dari tahapan pertama yaitu,

Identifikasi hambatan dan peluang yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) dibawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Hijau Indonesia sudah tercermin secara baik. Hal ini dapat dilihat dalam melaksanakan pengidentifikasian secara detail hingga mendapatkan konklusi sebagai peluang untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang melalui kolaborasi bersama. Selanjutnya, pada tahapan kedua Strategi debat untuk memengaruhi sudah dilakukan secara baik untuk tetap konsisten dalam melakukan perencanaan dengan membuat *policy brief* dan menggandeng lima elemen seperti lima elemen seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dan Merencanakan Tindakan Kolaborasi merupakan tahap terakhir yang sudah dilakukan secara baik oleh para pemangku kepentingan. Jika dilihat dari implementasi *policy brief* khususnya dalam penerapan program Si BESUT 3AH yang disosialisasikan kepada seluruh elemen di Kabupaten Jombang, dengan harapan kolaborasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Idris, Herdiana, D., & Miftakhul, I. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 9810–9819.
- John W, C., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design* (fourth edi).
- Manik. (2003). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Ramadhona, R., Wirjatmi, E., & Andhita, C. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *PERSPEKTIF*, 9(1), 54–65.
- Retno, S., Hardi, W., & Rachim Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press (ed.)).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). Alfabeta.
- Syam, D. (2014). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Dengan Pengelolaan Sampah di Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *Higiene*, 21–26.
- Undang-Undang No 18 tentang Pengelolaan Sampah, (2008).